

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Korea Utara merupakan Negara di kawasan Asia Timur yang berideologi Komunis. Selama ini Korea Utara terus menjadi perdebatan internasional. Hal ini dikarenakan Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan program nuklir. Nuklir tersebut dimaksudkan untuk sumber energi dan juga sebagai alat pertahanan Korea Utara. Dengan adanya nuklir, Korea Utara dapat menjadikannya sebagai strategi politis untuk menaikkan posisi tawarnya di mata dunia.

Asia Timur merupakan salah satu kawasan strategis di Asia yang sering sekali mengalami konflik. Hubungan antara negara – negara di kawasan tersebut (seperti : Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Korea Utara) kurang harmonis, karena antar negara tersebut selalu bersaing baik di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam hal ini, Korea Utara merupakan satu negara di kawasan Asia Timur yang sering menuai konflik. Misalkan saja konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan, dan juga masalah program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dewasa ini selalu menjadi bahan perdebatan hangat oleh berbagai negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Timur. Isu mengenai nuklir Korea Utara selalu mendapat kecaman keras dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur khususnya. Mereka khawatir tindakan Korea Utara tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik di kawasan Asia Timur. Dan dapat disimpulkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur tersebut dapat menentang keras program nuklir milik Korea

Utara dan mereka menginginkan Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya tersebut.

Namun kecaman dari negara-negara tetangganya tersebut tidak diindahkan oleh Korea Utara. Korea Utara tetap dengan keputusannya untuk melakukan program pengembangan nuklirnya. Sikap Korea Utara ini semakin meresahkan negara-negara di sekitarnya, sehingga berbagai tentangan dan kecaman dari berbagai negara semakin banyak ditujukan kepada Korea Utara. Berbagai upaya perundingan pun dilakukan oleh negara-negara tersebut, seperti perundingan enam pihak yang melibatkan Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Rusia. Perundingan tersebut bertujuan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.

Di tengah berbagai upaya untuk menghentikan program nuklir Korea Utara tersebut, Korea Utara justru berhasil melakukan uji coba nuklirnya yang pertama pada 9 Oktober 2006 yang merupakan salah satu wujud pembuktian atas keberhasilan program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Uji coba nuklir tersebut semakin membuat geram negara – negara di kawasan Asia Timur. Mereka khawatir akan pengaruh yang dapat ditimbulkan dari keberhasilan program nuklir Korea Utara tersebut terhadap stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Timur.

Hal tersebut di atas merupakan alasan bagi penulis dalam menetapkan judul "PENGARUH KEBERHASILAN PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DI ASIA TIMUR".

B. Tujuan Penelitian

Disamping sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan

diantaranya adalah :

1. Mencoba menjelaskan alasan Korea Utara mengembangkan program nuklir dan melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006.
2. Menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan dari keberhasilan pengembangan program nuklir Korea Utara tersebut terhadap stabilitas keamanan dan politik di Asia Timur.
3. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai manifestasi dan penerapan teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.

C. Latar Belakang Masalah

Studi Hubungan Internasional menunjukkan fenomena yang luas, meliputi interaksi antar anggota komunitas internasional atau perilaku aktor dalam sistem internasional. Perilaku tersebut dapat berwujud kerjasama, konflik, perang, pembentukan aliansi, dan interaksi dalam organisasi internasional.¹

Semenanjung Korea merupakan kawasan yang berpotensi konflik tinggi, terutama antara Korea Utara dan Korea Selatan yang memiliki sejarah konflik yang cukup panjang setelah berakhirnya masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea. Terbaginya dua negara Korea tersebut merupakan dampak dari terjadinya Perang Dunia II dan Perang Dingin yang melibatkan dua ideologi yaitu Komunis dan Kapitalis, dimana pada awalnya Korea merupakan satu negara bekas koloni Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengakhiri kekuasaannya atas Korea.² Keterlibatan dua ideologi yang berbeda antara Uni Soviet (Komunis) dengan Amerika Serikat (Kapitalis) telah mengakibatkan lahirnya dua regim yang berbeda di

¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 28

² W. J. G. van Veen, *Ilmu Hubungan Internasional*, Jilid 2, Jakarta, PT Gramedia, 1993, hal 93

Semenanjung Korea, yaitu Korea Utara dengan ideologi komunis dan Korea Selatan dengan ideologi kapitalis. Akibatnya konflik serta krisis kesepahaman kerap mewarnai kawasan Semenanjung Korea tersebut, yang kemudian menimbulkan ketegangan di dunia.

Adanya kekuatan asing yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan negara penghasil senjata modern dengan teknologi mutakhir yang memiliki daya ledak tinggi seperti senjata rudal dan nuklir dalam menopang kekuatan Korea Utara dan Korea Selatan, menjadikan kondisi di Semenanjung Korea semakin tegang. Masing-masing negara Korea tersebut didukung oleh dua negara super power yang saling berlawanan ideologi satu sama lain.

Kepemilikan senjata nuklir suatu negara memang menjadikan perubahan konteks politik internasional menjadi rawan terhadap terjadinya konflik. Nuklir sendiri merupakan senjata pemusnah massal yang sangat mutakhir saat ini yang memiliki daya ledak tinggi (*high explosive*) yang mampu memporak porandakan suatu negara. Untuk memiliki persenjataan nuklir ini, suatu negara tentunya harus memiliki kapasitas teknologi yang memadai dan juga didukung dengan biaya yang sangat besar. Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara mampu meningkatkan posisi tawar suatu negara secara politis di dunia. Misalkan saja Amerika Serikat, sebagai negara adidaya yang memiliki nuklir, Amerika mampu menekankan kepentingan politisnya terhadap negara lain, terutama negara-negara berkembang maupun negara-negara yang dikategorikan lemah baik secara politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Saat ini terdapat tujuh negara di dunia yang telah mengumumkan diri secara resmi sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Antara lain : Amerika Serikat (1945), Rusia (1949), Inggris (1952), Perancis (1960), Cina (1964), India (1974) dan

Pakistan (1998). Negara-negara tersebut memiliki pengaruh besar dalam percaturan politik internasional. Dan saat ini Korea Utara telah mensejajarkan namanya dengan ketujuh negara tersebut menjadi negara kedelapan yang memiliki senjata nuklir.

Memang terdapat sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan ketertarikan sebuah negara terhadap persenjataan nuklir. Tetapi untuk kepemilikan nuklir Korea Utara didorong oleh faktor keamanan, yaitu untuk memperkuat kekuatan militernya dan adanya faktor politis dibalik kepemilikan senjata nuklir tersebut, yaitu untuk menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) Korea Utara di level internasional.

Awal ketertarikan Korea Utara atas pemanfaatan senjata nuklir tidak terlepas dari pengaruh pemimpin pertamanya yaitu Kim-il Sung paska Perang Dunia II. Selain itu pengalaman paska Perang Korea (1950-1953) juga mendorong Korea Utara untuk membangun program nuklir. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran Korea Utara atas ancaman serangan dari pasukan Amerika Serikat yang menjadi sekutu Korea Selatan. Hal itulah yang mendorong Kim-il Sung melakukan kerjasama dengan Rusia dan Cina untuk membangun program pemanfaatan nuklir.

Faktor penting bagi Korea Utara dalam membangun senjata nuklir terjadi pada tahun 1965 ketika Uni Soviet mengirimkan reactor 2 Mw kepada Korea Utara dan ditempatkan oleh Korea Utara di Yongbyon. Kemudian Korea Utara membangun fasilitas nuklirnya tersebut di Yongbyon.³

Isu nuklir Korea Utara tersebut semakin menghangat ketika adanya pantauan satelit Amerika Serikat yang mengidentifikasi adanya fasilitas nuklir Korea Utara di wilayah Yongbyon yang diduga telah beroperasi sejak tahun 1987. Dengan adanya

³ Andika D Wanda, *Nuklir Korea Utara dan Dunia Internasional*, Jakarta: Lentera, 2011.

hasil identifikasi itu, Amerika Serikat selalu memantau kegiatan nuklir Korea Utara tersebut melalui satelitnya. Hal itu dikarenakan dugaan Amerika Serikat mengenai fasilitas nuklir Korea Utara tersebut sebagai langkah awal dari rencana pembuatan ataupun pengembangan program senjata nuklir di Korea Utara.

Pada tahun 1994 akhirnya Korea Utara melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Korea Utara menandatangani kerangka kesepakatan (Frame Agreement) untuk melakukan penghentian program nuklirnya, dengan kesepakatan bahwa Amerika dan koalisinya bersedia untuk memberikan imbal balik yang menguntungkan bagi Korea Utara. Keuntungan yang ditawarkan Amerika Serikat kepada Korea Utara dalam kesepakatan tersebut antara lain: Amerika Serikat dan koalisinya bersedia memberikan reactor nuklir air (*light water nuclear reactors*) sebagai sumber energi alternatif bagi Korea Utara yang memiliki kapasitas listrik 2000 Megawatt. Selain itu Amerika Serikat juga menyetujui untuk mengurangi embargo ekonominya terhadap Korea Utara.

Namun kerangka kesepakatan tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2002 Korea Utara kembali memperkuat dirinya karena adanya provokasi dari Amerika Serikat. Pemicunya adalah pernyataan Presiden George W Bush bahwa Korut, bersama Iran dan Irak adalah "*axis of evil*" alias "poros setan".⁴

Sejak tahun 2002 krisis nuklir Korea Utara terus meningkat. Korea Utara bahkan menolak badan energi nuklir dunia "International Atomic Energy Agency (IAEA)" yang datang untuk memeriksa reaktor nuklir di negaranya, dimana pada 1994 telah keluar dari keanggotaannya di IAEA. Pada 9 Januari 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian kerangka kesepakatan Non-Proliferation Treaty (NPT),

⁴ Dunia Dalam Angkasa, Republik, Rabu, 11 Oktober 2002

dimana Korea utara telah keluar dari keanggotaannya dalam NPT pada 12 Maret 1993. Kemudian Korea Utara mengadakan penelitian dan pengembangan nuklir secara terang-terangan. Hal tersebut mengejutkan semua negara di dunia terutama di kawasan Asia Timur.

Adanya program nuklir Korea Utara memicu kekhawatiran baru di dunia khususnya kawasan Asia Timur. Berbagai negara di dunia mengecam keras program nuklir yang dikembangkan Korea Utara tersebut. Banyak negara terutama negara di wilayah Asia Timur yang notabene bertetangga dengan Korea Utara merasa cemas. Mereka khawatir program nuklir Korea Utara tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan negara mereka. Selain itu program nuklir Korea Utara juga dapat memicu perlombaan senjata di dunia yang dapat mengancam perdamaian dunia.

Adanya isu nuklir Korea Utara tersebut menyebabkan suhu politik dan stabilitas kawasan Asia Timur memanas. Korea Selatan yang berada di wilayah Semenanjung Korea yang merupakan negara tetangga Korea Utara, merasa sangat terancam, apalagi kedua negara tersebut memiliki sejarah konflik yang cukup panjang. Presiden Korea Selatan terpilih, Roh Moo-Hyun khawatir dengan upaya reunifikasi Korea menjadi gagal dengan adanya isu ini. Korea Selatan sendiri memiliki keinginan yang sama dengan Amerika Serikat yaitu untuk menghentikan program nuklir Korea Utara melalui perundingan yang dilakukan dengan Korea Utara.

Untuk mengantisipasi ancaman serangan dari Korea Utara, Korea Selatan mengadakan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Amerika Serikat menempatkan pasukannya di Korea Selatan yang tergabung dalam United States Force in Korean (USFK) yang dilengkapi dengan peralatan militer yang mutakhir. Hubungan kerjasama pertahanan Korea Selatan Amerika Serikat itu juga ditunjukkan dalam bentuk perjanjian hubungan antara

kedua negara, yaitu Combined Forces Command (CFC), yang bertugas untuk membantu militer Korea Selatan dari ancaman agresi militer Korea Utara. Pasukan militer gabungan tersebut sering mengadakan latihan militer bersama.

Serupa dengan Korea Selatan, Jepang juga melakukan upaya antisipasi terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Jepang mengecam keras tindakan Korea Utara dalam pengembangan nuklir Korea Utara karena program tersebut merupakan ancaman besar bagi Jepang. Apalagi Korea Utara pernah melakukan uji coba terhadap rudal Taepodong I pada tahun 1998 dan Taepodong II pada 2005 lalu, dimana dalam uji coba itu rudal tersebut jatuh di wilayah perairan Jepang. Oleh karena itu Jepang merasa terancam dan perlu meningkatkan sistem pertahanan negaranya kembali dengan melakukan modernisasi militernya. Salah satunya telah dimulai melalui pengembangan sistem pertahanan rudal balistik (ballistic missile defense system) bekerjasama dengan AS.⁵

Sedangkan Cina yang merupakan negara yang memiliki kedekatan dengan Korea Utara juga mengecam program nuklir tersebut. Cina meminta agar Korea Utara segera melakukan denuklirisasi.

Seiring dengan isu nuklir Korea Utara yang semakin memanas, membuat sejumlah negara yang berada di sekitar Korea Utara mengambil tindakan yaitu dengan membentuk perundingan yang melibatkan enam negara, yaitu *six party's talk* (perundingan enam pihak). Perundingan tersebut diikuti oleh Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Perundingan *six party* tersebut dimaksudkan untuk meredakan ketegangan yang berawal dari pasca Perang Korea dan membawa kepada krisis nuklir agar mengalami titik terang.

⁵ Andhika P. Wendy, *Nuklir Korea Utara dan Perimbangan Kekuatan di Asia Timur*, <http://wendhika-wendie.blogspot.com/>

Perundingan *six party* tersebut telah dilaksanakan beberapa kali. Hal ini dimaksudkan agar masalah mengenai krisis nuklir Korea Utara dapat segera terselesaikan. Namun dari semua hasil pertemuan yang telah dilakukan, dapat dikatakan belum mendapatkan solusi yang baik sampai saat ini.

Di tengah menghangatnya pembahasan mengenai isu nuklir tersebut, Korea Utara mengumumkan diri telah berhasil melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya pada 9 Oktober 2006 pukul 10:36 waktu setempat. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut dilakukan di Hwadaeri, dekat kota Kilju, di Propinsi Hamkyung Utara. Tak kurang ada 20 stasiun pemantau yang berhasil mendeteksi detonasi nuklir Korut ini, mulai dari yang ada di dekat lokasi seperti Cina, Jepang, dan Korsel, hingga yang jauh, seperti di Australia, Ukraina, dan Amerika Serikat (di Wyoming dan Nevada).⁶

Akibat dari uji coba nuklir tersebut, terjadi gempa bumi di sektor wilayah uji coba tersebut. Institut Ilmu Bumi dan Sumber Daya Mineral Korea Selatan melaporkan bahwa telah terjadi gempa bumi pada magnetudo 3,58 sampai 3,7 pada Skala Richter pada waktu itu. Badan Survei Geologi Amerika Serikat juga telah melaporkan bahwa telah mendeteksi aktivitas gempa pada level 4,2 Skala Richter pada pukul 10: 35: 27, waktu setempat pada 9 Oktober 2006, dengan pusat episentrum pada 41. 311 LU; 129,114 BT.⁷ Uji coba nuklir tersebut dilaporkan setara dengan 550 ton TNT.

Keberhasilan uji coba nuklir tersebut dilakukan dengan mengandalkan kekuatan teknologi yang dikembangkan sendiri. Pemerintah Korut juga mengklaim bahwa tak terjadi kebocoran radioaktif ke luar lokasi uji coba. "Ini merupakan sebuah

⁶ *Nuklir "Imut-imut" tapi Mengguncangkan*, <http://kompas.com/kompas-cetak/oblo/11/utama/3020068>, Didownload: Rabu, 15 November 2006

⁷ *Nuclear Weapon Testing*, <http://www.globalsecurity.org/wmd/world/dnkr/nucle-test.htm>

dorongan besar dan kebanggaan tersendiri bagi rakyat Korut.”⁸

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana pengaruh keberhasilan program nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan dan politik di kawasan Asia Timur?”.

E. Kerangka Dasar Pemikiran :

Teori adalah konsep – konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena secara ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menggunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan fenomena diatas. Kerangka pemikiran tersebut antara lain :

1. Teori Sistem

Sistem adalah kumpulan unit – unit atau bagian – bagian yang saling berinteraksi dan saling tergantung. Jika sistem mengalami perubahan, maka bagian – bagian lainpun akan mengalami perubahan. Pendekatan ini tepat untuk dipakai terutama jika kita mendefinisikan proses politik luar negeri sebagai

*” suatu mekanisme bagi suatu sistem politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya.”*⁹

Menurut John Lovell, suatu sistem memiliki unsur – unsur utama sebagai berikut:

⁸ *Dunia Kecam Uji Coba Nuklir Korut*, www.republika.co.id

⁹ John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective*, dikutip dari Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Teori dan Analisis*, Jember, 1999, hal. 1117

1. *Serangkaian bagian – bagian yang secara bersama-sama mampu melakukan kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan.*

2. *Hubungan fungsional antar – bagian.*

Setiap bagian dalam sistem itu penting, karena dalam suatu sistem setiap bagian menjalankan fungsi yang mempengaruhi efektivitas kerja suatu sistem. Begitu pula dalam sistem politik, jika bagian – bagiannya tidak berfungsi secara efektif, maka sistem politik tersebut akan macet.

3. *Hubungan antara sistem dengan lingkungannya.*

Sebagai sistem terbuka, sistem politik berhubungan terus – menerus dengan lingkungannya melalui penerimaan input, dalam bentuk tuntutan dan dukungan dari lingkungan, dan melalui output yang berupa upaya sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau mengendalikannya.¹⁰ Cara paling tepat menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya itu adalah sebagai hubungan timbal balik yang dinamis. Artinya lingkungan dapat mempengaruhi sistem, dan juga sebaliknya sistem juga dapat mempengaruhi lingkungan tersebut.

Di dalam menggunakan teori sistem, diperlukan perhatian pada fenomena yang muncul di tingkat internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem politik internasional tidak hanya merupakan hasil tindakan politik atas bagian dari sub sistem tetapi juga dari kedalaman ekonomi, sosial, budaya, dan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk sub-sub politik dan pengaruh yang mendalam tidak hanya terhadap interaksi antar sub sistem tetapi juga dalam cara bagaimana sub sistem ini menghadapi sistem internasional.

¹⁰ *John J. Mears, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorinya* UGM, 1990

2. Konsep Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)

Permasalahan pertahanan dan keamanan selalu menjadi suatu permasalahan terpenting dalam politik luar negeri suatu negara. Saat ini banyak negara yang menganggap masalah pertahanan dan keamanan menjadi hal terpenting bagi eksistensi negara serta merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan-tujuan negara tersebut. Masalah pertahanan dan keamanan suatu negara tentunya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal negara, yaitu ditentukan oleh tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Di sinilah terletak "*security dilemma*" (dilema keamanan) yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, yaitu upaya suatu negara untuk memelihara atau meningkatkan keamanannya sendiri, sebuah negara dapat mengambil langkah-langkah yang berdampak mengurangi keamanan negara-negara lainnya dan pada gilirannya negara-negara ini akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menetralkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh negara pertama dan mungkin bahkan dapat mengancam keamanan negara pertama. Negara pertama pun akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindak lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan dari negara-negara lainnya, dan demikian seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa "*security dilemma*" (dilema keamanan) merupakan suatu pembahasan konsep yang didasari atas kesalahan persepsi atas maksud tujuan dan kemampuan. Dalam hal ini, kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya.¹¹ Dan pada akhirnya tindakan tersebut menciptakan perilaku yang saling mengungguli kekuatan lawan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian memunculkan konsep dilema keamanan.

"Security Dilemma" juga berarti prinsip atau aksi reaksi dapat terjadi diantara

dua negara atau lebih sehingga masing-masing negara akan mengeluarkan anggaran belanja persenjataan yang terus membesar dan ini berarti bahwa mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang semakin berbahaya.¹²

Pembahasan mengenai dilema keamanan tentunya berkaitan erat dengan perlombaan senjata (*arms race*). Dilema keamanan mendorong adanya perlombaan senjata, dimana dalam kondisi dilema keamanan semua pihak berupaya untuk saling mengungguli kekuatan lawannya dengan meningkatkan kapasitas persenjataan dan pasukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif demi memperkuat pertahanannya.

Perlombaan senjata (*arms race*) merupakan kompetisi antara dua atau lebih negara dengan meningkatkan persenjataannya untuk meraih kekuasaan dan keamanan karena adanya rasa saling terancam satu sama lain, baik secara politik maupun militer. Pada dasarnya, persenjataan dapat memperbanyak pilihan tindakan dalam menghadapi konflik yang diakibatkan oleh suatu keputusan, baik yang dibuat secara rasional maupun irasional.¹³

Persenjataan dapat dijadikan sebagai pencegahan atau *self defense* dari ancaman keamanan bagi suatu negara. Selain itu persenjataan juga dapat meningkatkan prestise atau pun superioritas bagi suatu negara dengan melakukan modernisasi persenjataan. Namun upaya-upaya tersebut justru memunculkan reaksi bagi negara lainnya untuk ikut meningkatkan pertahanan keamanannya dengan modernisasi persenjataan. Sehingga dilema keamanan pun tak dapat dielakkan, yang kemudian mendorong terciptanya kecenderungan "arms race" di suatu wilayah atau kawasan tertentu yang dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian dunia.

¹¹ Walter S. Jones, *op. cit.*, hal. 196

¹² Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Penyunting Drs. Dya'roni, Surabaya: Usaha Nasional, 1989, hal. 68-69

¹³ Walter S. Jones, *op. cit.*, hal. 199

3. Konsep Stabilitas di Kawasan Asia Timur

Membahas mengenai konsep stabilitas dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari konsep perimbangan kekuasaan yang bersifat multipolar. Pengertian dari multipolar sendiri adalah pola kekuasaan dunia yang memiliki banyak pusat kekuasaan, tidak didominasi oleh dua negara super power saja (bipolar) sebagai pusat kekuatannya melainkan lebih dari dua negara.

Ronald Yalem memandang munculnya kekuatan tripolar atau multipolar dimana dua kekuatan berkoalisi melawan pihak ketiga.¹⁴ Dalam pola multipolar, potensi terjadinya konflik lebih besar daripada dalam kekuatan bipolar. Stabilitas dalam sistem ini tergantung pada upaya pencegahan setiap negara untuk mencegah munculnya kekuatan bipolar. Tiap negara harus tahan pada tantangan dimana jajaran kekuatan bipolar melawan kekuatan pihak ketiga.¹⁵

Deutsch dan Singer berasumsi bahwa interaksi diantara berbagai negara lebih bersifat kompetitif daripada kooperatif, keterbatasan interaksi, adalah potensi terbesar bagi ketidak stabilan.¹⁶ Jadi berdasarkan asumsi tersebut, stabilitas di kawasan bergantung dari pola interaksi diantara negara-negara di dalam kawasan tersebut, karena pola interaksi yang baik dapat menumbuhkan sebuah kondisi keamanan yang harmonis dan stabil.

Di dalam sistem internasional yang anarkis ini, stabilitas akan dicapai melalui perimbangan kekuatan. Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu, setiap saat dapat berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi pada akhirnya perimbangan baru akan tercipta baik melalui jalur damai, pengembangan kekuatan pertahanan keamanan maupun

¹⁴ *Ibid*, hal. 159

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ ...

melalui kekerasan (perang).

Di Asia sendiri, khususnya di Asia Timur mengandung perimbangan kekuasaan yang sangat kompleks.¹⁷ Beberapa wilayah negara di kawasan Asia Timur merupakan tepi kawasan nuklir Amerika Serikat, diantaranya yaitu Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Bagi Amerika Serikat, negara-negara tersebut sangat penting guna menjaga dominasi kekuatan Amerika untuk mencapai kepentingannya di kawasan Asia Timur. Sedangkan bagi ketiga negara tersebut, kerjasama dengan Amerika sangat penting guna mendukung pertahanan keamanan negaranya masing-masing. Selain Amerika Serikat, negara lain yang juga memiliki kekuatan dominasi di wilayah Asia Timur saat ini yaitu Cina. Saat ini Cina telah mampu mengembangkan teknologi nuklirnya serta telah mengklaim sebagai salah satu negara pemilik nuklir di dunia.

Akan tetapi saat ini polaritas kekuatan di kawasan ini mulai berubah dengan adanya Korea Utara yang juga melakukan pengembangan program nuklirnya. Bahkan beberapa waktu lalu Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan di Asia Timur. Dengan kondisi yang demikian maka dapat memicu munculnya berbagai permasalahan maupun konflik baru di kawasan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persaingan kekuatan yang terjadi dapat mengganggu stabilitas keamanan. Jadi stabilitas dapat tercipta jika terbina interaksi yang baik diantara negara-negara di Asia Timur, serta tidak terjadi persaingan kekuatan yang dapat memicu kondisi dilema keamanan dan *arms race* yang dapat menimbulkan konflik baru di kawasan.

Kerangka dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas dapat digunakan dalam pembahasan mengenai pengaruh keberhasilan program nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan dan politik di Asia Timur. Teori sistem, konsep dilema keamanan, serta konsep stabilitas kawasan yang digunakan penulis memiliki kaitan erat dengan judul skripsi ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori sistem di atas, penulis menggambarkan Korea Utara dimana dalam pembuatan kebijakan politik luar negerinya, terutama tentang kebijakannya untuk melakukan pengembangan program nuklir dapat mempengaruhi kondisi lingkungan internasional, khususnya di kawasan Asia timur. Dimana perubahan kebijakan yang diambil oleh Korea Utara untuk memantapkan langkahnya sebagai salah satu negara pemilik nuklir di dunia dengan melakukan uji coba nuklir tersebut tentunya akan diikuti dengan perubahan-perubahan kebijakan yang akan diambil oleh negara-negara di sekitarnya yang berada di kawasan Asia Timur.

Keberhasilan Korea Utara dalam program nuklir tentu menjadi sebuah konflik baru. Apalagi keberhasilan tersebut semakin didukung dengan suksesnya uji coba nuklir Korea Utara yang pertama kalinya dilaksanakan pada 9 oktober 2006 lalu, yang tentunya mendapatkan kecaman keras dari berbagai negara terutama negara-negara di kawasan Asia Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Korea Utara. Berbagai kecaman tersebut merupakan tanggapan atau reaksi yang dilontarkan oleh beberapa negara di kawasan Asia Timur tersebut kepada Korea Utara atas program nuklir yang dikembangkan Korea Utara. Mereka khawatir program nuklir Korea Utara tersebut dapat menimbulkan ketegangan baru di kawasan ini.

Keberhasilan program nuklir Korea Utara mendorong munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai *security dilemma* (dilema keamanan). Dalam kondisi ini

banyak negara di kawasan Asia Timur yang kemudian merasa terusik dengan keberhasilan program nuklir Korea Utara tersebut. Mereka menganggap tindakan Korea Utara tersebut sebagai ancaman bagi pertahanan nasional mereka masing-masing, sehingga mereka pun mengemukakan keras tindakan Korea Utara tersebut dan menghendaki agar Korea Utara segera menghentikan pengembangan program nuklirnya. Kecaman-kecaman tersebut antara lain seperti yang dilontarkan Jepang, dimana Jepang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menjatuhkan sanksi keras terhadap Korea Utara atas uji coba nuklir yang dilakukannya.

Bahkan Cina yang memiliki kedekatan khusus dengan Korea Utara pun sangat menentang keras tindakan Korea Utara tersebut dan menghimbau agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya yang dianggap dapat memperburuk situasi di kawasan Asia Timur. Hal ini didukung dengan adanya maklumat kementerian luar negeri Cina yang menegaskan bahwa “DPRK (*Democratic People Republic of Korea*) telah mengabaikan penentangan secara luas masyarakat internasional dan melakukan uji coba nuklir secara tidak tahu malu pada 9 Oktober 2006”.¹⁸

Selain itu kecaman-kecaman tersebut juga diikuti dengan berbagai upaya yang dilakukan negara-negara di Asia Timur tersebut untuk meningkatkan kapasitas persenjataan dan pasukan militernya guna memperkuat pertahanan nasional mereka sebagai langkah defensif dari kemungkinan ancaman Korea Utara. Sehingga dilema keamanan pun tidak dapat dihindari.

Situasi seperti ini juga dapat meningkatkan kecenderungan perlombaan senjata (*arms race*). Dimana dalam kondisi dilema keamanan, setiap negara tersebut berkompetisi untuk mengungguli kekuatan lawannya dengan meningkatkan kapasitas

pertahanan nasionalnya.

Beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas persenjataannya untuk mengantisipasi ancaman dari Korea Utara. Hal ini tentunya diwujudkan dengan adanya beberapa kebijakan tentang pertahanan keamanan yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional masing-masing negara, seperti Korea Selatan dan Jepang.

Setelah uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Yun Kwang-ung menginstruksikan agar militer Korea Selatan bersiaga penuh untuk meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan udara dan darat Negara ini, serta membentuk pasukan reaksi cepat untuk menghadapi kemungkinan serangan Korea Utara.¹⁹ Bahkan militer Korea Selatan juga dilaporkan sedang mempersiapkan satuan perang nuklir di semenanjung Korea setelah Korea Utara mengklaim uji coba bom nuklirnya.²⁰

Selain itu reaksi serupa juga dilakukan oleh Jepang. Jepang mengecam keras tindakan Korea Utara tersebut. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi Jepang. Apalagi peluru kendali milik Korea Utara yaitu Taepodong I dan II pernah jatuh di wilayah Jepang saat uji coba pada tahun 1998 dan Juli 2006. Dan dengan keberhasilan uji coba nuklir Korea Utara pada 9 Oktober 2006 lalu, Jepang pun merasa semakin terancam. Untuk itu Jepang pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara. Selain itu, adanya uji coba nuklir Korea Utara juga mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya, yaitu dengan melakukan modernisasi militer guna meningkatkan system pertahanan keamanan negaranya. Dimana Jepang meningkatkan

¹⁸ Cina Kecam Uji Coba Nuklir Korut, www.mediaindo.co.id

¹⁹ Menhan Korsel Siagakan Pasukannya, <http://indonesian.irib.ir/>

²⁰ *Militar Korea Selatan Siapkan Satuan Perang Nuklir*

status Badan Pertahanannya menjadi Departemen Pertahanan yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Peningkatan status Badan Pertahanan Jepang menjadi Departemen Pertahanan tersebut telah disetujui oleh parlemen Jepang pada bulan Desember 2006. Bahkan hal ini mendapat dukungan dari partai-partai oposisi. Dan secara resmi Departemen Pertahanan (Dephan) Jepang pada 9 Januari 2007. Dengan adanya Departemen Pertahanan tersebut, Jepang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam sistem pertahanan negaranya karena berhak merencanakan anggaran militernya sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang, bahkan dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Peningkatan status Badan Pertahanan ini mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman di kawasan, terutama dari Korea Utara.²¹

Hal – hal tersebut di atas merupakan beberapa reaksi yang muncul akibat dari pengembangan program nuklir Korea Utara sejak beberapa waktu silam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengembangan program nuklir Korea Utara dapat memicu adanya suatu dilema keamanan baru dan perlombaan senjata di kawasan Asia Timur yang mungkin dapat mengancam konstelasi keamanan dan politik di kawasan tersebut.

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka dasar pemikiran yang telah ditetapkan maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

Keberhasilan pengembangan program nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut

dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik di Asia Timur, yaitu:

1. Memicu munculnya kecenderungan dilema keamanan di kawasan Asia Timur.
2. Memicu adanya *arms race* diantara negara-negara di kawasan Asia Timur tersebut.

G. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari segi materi pembahasan, penulis menekankan pembahasan mengenai bagaimana stabilitas keamanan dan politik di kawasan Asia Timur dengan adanya program nuklir Korea Utara, karena dengan program nuklir tersebut Korea Utara mendapatkan banyak kecaman dari berbagai negara di dunia, terutama dari negara-negara di Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Namun pembahasan tersebut tidak bersifat kaku dan dapat berkembang sejauh data tersebut dapat mendukung dalam penulisan ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi pustaka, dimana data-data yang diperoleh untuk penulisan ini dikumpulkan melalui hasil-hasil pustaka. Oleh karena itu data seluruhnya merupakan data sekunder.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar penelitian, hipotesis, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan

BAB II : Bab ini menerangkan tentang posisi Korea Utara di dalam konstelasi keamanan dan politik di Asia Timur yang meliputi gambaran umum dan posisi Korea Utara dalam kawasan keamanan Asia Timur.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang kebijakan pengembangan program nuklir Korea Utara yang meliputi usaha pengembangan program nuklir Korea Utara, alasan Korea Utara mengembangkan program nuklir, serta usaha uji coba nuklir Korea Utara.

BAB IV : Bab ini menerangkan tentang bagaimana pengaruh yang ditimbulkan paska keberhasilan program nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan dan politik di Asia Timur yang meliputi bukti bahaya nuklir, reaksi Jepang terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara, reaksi Korea Selatan terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara, dan reaksi Amerika Serikat terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara.